

Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu Pada Periode 2016-2019

Reza Aqshal Atamimi¹

Andrea Abdul Rahman Azzqy²

Abstract

This study aims to describe the efforts made by Indonesia, Malaysia and the Philippines in maintaining the security stability in the Sulu Sea through a form of Trilateral cooperation, namely INDOMALPHI. This study used descriptive qualitative method. The type of data used in the form of primary and secondary with primary data collected through interviews with the Head of the Multilateral Sub-Directorate of the Ministry of Defense and with the former Minister of Foreign Affairs of Indonesia for the period 2001-2009 and secondary data through literature studies. This study uses a series of analytical blades in the form of the theory of Regional Security Complex and the concept of Maritime Security. Indonesia, Malaysia and the Philippines, which have a common interest in the security sector, which is the security of the Sulu Sea, carry out a Trilateral cooperation called INDOMALPHI. This collaboration was initiated after incidents of piracy and kidnapping by the Abu Sayyaf group in 2014 and reached its highest point in 2016. In its efforts to maintain the stability of the Sulu Sea security, INDOMALPHI formed several collaborations namely the Maritime Command Center, Trilateral Maritime Patrol, Trilateral Air Patrol, and Port Visit. In this study, the results of the collaboration between INDOMALPHI, which in the year after it was launched, had a positive impact in the form of shrinking the crime rate, both piracy and kidnapping in the Sulu Sea.

Keywords: INDOMALPHI, maritime security, piracy, Southeast Asia, Sulu Sea

Pendahuluan

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang memiliki luas wilayah lautan cukup besar dengan 80% dari total keseluruhan wilayahnya merupakan lautan. Sebagai salah satu kawasan di dunia yang dikelilingi oleh wilayah laut yang luas, kawasan ini masih mengandalkan laut untuk berbagai aktivitas seperti transportasi,

¹ Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, Email: rezaqshal19@gmail.com

² Dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

perdagangan, dan aktivitas perekonomian masyarakatnya seperti profesi nelayan. Salah satu kawasan Laut di Asia Tenggara yang aktivitasnya cukup padat adalah Laut Sulu. Laut ini terletak di bagian timur dari Palawan, Filipina serta Sabah, Malaysia dan berada di bagian barat dari Visayas dan Mindanao, Filipina (Underwater Asia, 2019).



Gambar 1. Letak Geografis Laut Sulu
Sumber: Nations Online, dan diolah oleh Penulis.

Menurut data yang diperoleh, setiap tahunnya kapal yang melalui Laut Sulu membawa muatan rata-rata lebih dari 55 juta metric ton dan juga lebih dari 18 juta orang melintasi laut ini (Roza, 2018: 9). Disamping itu juga terhitung kapal kargo yang melintasi Laut Sulu membawa muatan senilai 40 miliar Dollar dengan 700-800 juta Dollar berupa ekspor hasil tambang batu bara Indonesia ke Filipina (Roza, 2018: 9). Besarnya nilai muatan dan kargo yang melintasi Laut Sulu memunculkan ancaman tersendiri pada Laut ini yang merusak stabilitas keamanannya. Ancaman ini datang dari kelompok Abu Sayyaf yang dalam rentang 2014 sampai 2016 melakukan serangkaian aksi perompakan kapal dan penculikan di kawasan tersebut. Dalam kurun 2014-2016 tercatat terjadi peningkatan dalam jumlah yang signifikan dengan puncaknya pada tahun 2016 tercatat 16 kali percobaan perompakan, dengan 10 percobaan berhasil dan 6 kali terdeteksi (ReCAAP, 2016). Disamping perompakan, kejahatan lain yang mengancam Laut Sulu adalah Penculikan. Dalam rentang 2014-2016 tindak kejahatan ini terdiri dari 5 kasus penculikan pada tahun 2014 dengan korban 9 orang, dan 3 kasus pada tahun 2015 dengan 19 korban, dan 2016 menjadi tahun dengan insiden terbesar terdiri dari 10 kasus dengan 48 korban (ReCAAP, 2016).

Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai 3 Negara yang merupakan *Litoral State* atau Negara Pantai yang wilayahnya berbatasan dengan Laut Sulu sekaligus Negara yang sering terkait dalam tindak kejahatan ini melihat adanya ancaman di Laut Sulu dan melakukan Inisiasi kerja sama sub-regional yaitu INDOMALPHI. Kerja sama ini dirumuskan setelah serangkaian aktivitas perompakan dan penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2014 dengan titik tertinggi pada tahun 2016. Kerja sama ini dibangun sebagai tindakan responsif sekaligus preventif terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa serupa melalui *Maritime Command Center (MCC)*, *Trilateral Maritime Patrol (TMP)*, *Trilateral Air Patrol (TAP)*, dan *Port Visit*.

Keamanan Laut Sulu merupakan hal yang krusial bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan yang melintasinya. Meningkatnya angka kejahatan di Laut ini menjadi ancaman pada kapal-kapal yang melintas, terlebih kapal-kapal yang membawa muatan bernilai tinggi. Ketidakstabilan keamanan di Laut Sulu memunculkan langkah kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka timbul pertanyaan penelitian "Bagaimana Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu 2016-2019"

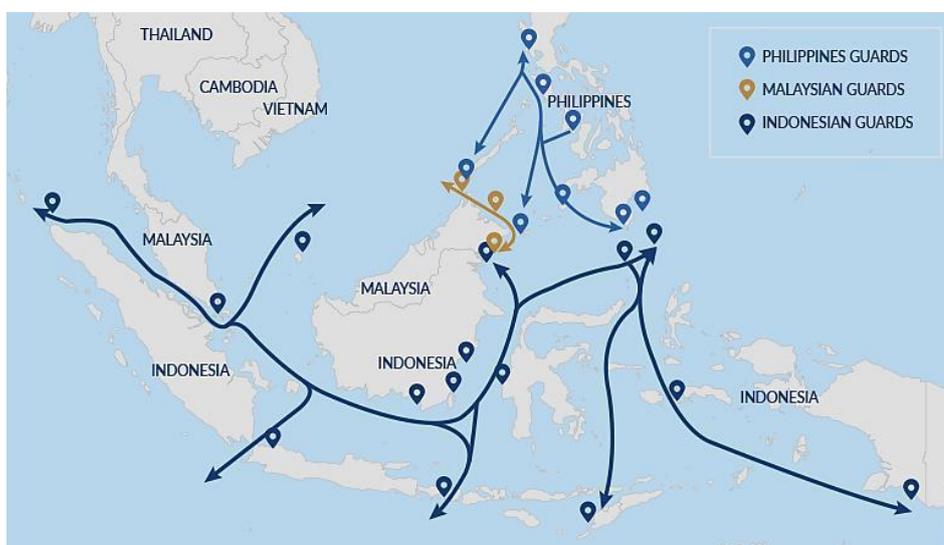
Pembahasan

Keamanan wilayah laut menjadi penting bagi suatu kawasan ataupun suatu Negara karena selain sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai arus perdagangan yang berperan dalam Bergeraknya roda perekonomian suatu kawasan atau Negara. Pentingnya laut bagi suatu kawasan atau Negara nyatanya harus diiringi oleh stabilitas di wilayah laut itu sendiri guna memperlancar segala aktivitas didalamnya. Laut Sulu sebagai salah satu Laut di kawasan Asia Tenggara yang memiliki arus perekonomian cukup padat mencakup transportasi maupun arus perdagangan menjadikannya kawasan Laut yang perlu dijaga stabilitas keamanannya.

Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai *Litoral State* dari Laut Sulu dan juga sebagai Negara yang sering terkait dalam beberapa kasus perompakan dan penculikan melakukan inisiasi kerja sama komperhensif sebagai respon dan juga tindakan preventif terhadap tindak kejahatan tersebut. Kerja sama ini disepakati setelah beberapa kali pertemuan yang membahas kerangka kerja sama dan poin-poin kesepakatan dalam melakukan pengamanan di Laut Sulu. Kerja sama ini disepakati setelah serangkaian agenda pertemuan yang pertama dilakukan pertama pada 5 Mei 2016 hingga diluncurkannya kerja sama ini pada 19 Juni 2017 yang dihadiri Menteri Pertahanan masing-masing dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kerja sama ini pada implementasinya untuk mengamankan wilayah Laut Sulu melakukan beberapa kerja sama berbasis militer yaitu *Maritime Command Center (MCC)*, *Trilateral Maritime Patrol (TMP)*, *Trilateral Air Patrol (TAP)*, dan *Port Visit*.

MCC merupakan pusat komando dari kerja sama ini yang diluncurkan pertama kali bersamaan dengan TMP pada 19 Juni 2017 dengan masing-masing Negara memiliki MCC-nya sendiri yaitu Indonesia, berada di Tarakan yang merupakan batas paling ujung pada pulau Kalimantan yang paling dekat dengan wilayah Malaysia dan juga Filipina sekaligus berada di antara Laut Sulu dan Sulawesi. Malaysia berada di Tawau, dan Filipina berada di Zamboanga (Ramsi, Wawancara, 10 Mei 2019). Pembangunan MCC ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan beberapa aspek seperti komunikasi, *surveillance*, dan komputerisasi sehingga dapat menghasilkan output kemampuan deteksi dan analisa yang akurat, cepat, dan cermat dalam pengambilan keputusan komando dan pengendalian (Ramsi, Wawancara, 10 Mei 2019). Seperti pusat informasi yang nantinya informasi yang

berhasil dihimpun akan dijadikan pendukung pada patrol terkoordinasi yang berjalan di laut maupun udara. Melalui MCC juga ditempatkan *liason officer* dari masing-masing Negara yang keberadaannya akan dirotasi setiap latihan gabungan diadakan.



Gambar 2. Wilayah Tugas INDOMALPHI dalam *Transit Corridor*
Sumber: *Oceans Beyond Piracy*, 2018.

Melalui MCC ini juga dioperasikan *Transit Corridor* yang merupakan salah satu upaya INDOMALPHI dalam mencegah tindak kejahatan di Laut Sulu dengan melalui beberapa rute yang telah diajukan oleh Malaysia dan Filipina dalam proses pendirian INDOMALPHI. Koridor transit yang dibuat ini mengelilingi sekitar kepulauan Sulu yang diasumsikan merupakan basis bagi kelompok-kelompok yang akan melakukan kejahatan di laut untuk menyusun rencana dan strategi. *Transit Corridor* yang merupakan salah satu upaya ini dibentuk dengan tujuan sebagai alternatif bagi kapal-kapal yang hendak melintas di wilayah yang dianggap zona merah. Tidak hanya sebagai jalur alternatif, tapi juga diberikan bantuan berbentuk pendampingan maritim untuk kapal-kapal yang hendak melintas dan melanjutkan perjalanannya hingga melewati Laut Sulu.

Disaat yang sama pada peluncuran MCC, juga diluncurkan TMP yaitu Patroli maritim terkoordinasi yang dilakukan dengan tujuan menghalau ancaman non-tradisional yang meliputi perompakan, penculikan, terorisme, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lain yang terjadi di wilayah Laut Sulu (Straitstimes, 2017). TMP dalam penerapannya, dilakukan secara rutin sepanjang tahun. Dalam TMP yang dilaksanakan ketiga Negara ini, masing-masing Negara mengerahkan beberapa armada kapal perangnya dengan berbagai jenis yang disesuaikan dengan kapabilitas dan kebutuhan dalam melakukan patroli terkoordinasi di lautan.

Tabel 1. Jenis dan jumlah Kapal dalam Trilateral Maritime Patrol

Negara	Kapal
Indonesia	KRI Sidat-851
	KRI Terapang-648
	KRI Ajak-653
Malaysia	KD Baung-3509
	KD Todak-3506
Filipina	BRP General Mariano Alvarez-38
	BRP Felix Apolinario

Sumber: Benarnews, 2017.

Pasca diluncurkannya MCC dan TMP, juga dilaksanakan TAP pada 12 Oktober 2017 di Subang, Malaysia sebagai pelengkap dari MCC dan TMP yang telah terlebih dahulu berjalan. Dalam patroli udara terkoordinasi antara ketiga Negara ini dilaksanakan secara rutin yaitu satu minggu sekali dengan hari dan giliran yang diatur sesuai kesepakatan bersama. Kerja sama patrol udara ini merupakan bentuk kerja sama yang merujuk pada kerja sama *Eye in the Sky* (EiS) yang dilakukan oleh *Malacca Strait Patrol* (Defense News, 2017). Kerja sama yang dilakukan pada tahun 2005 ini dilakukan dengan menggunakan pesawat udara yang mengelilingi wilayah pengamanan selat Malaka (Wijaya, 2017: 191). Dalam pelaksanaan patroli udara terkoordinasi ini, dilakukan dengan armada pesawat yang dikerahkan oleh masing-masing Negara yang terlibat yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Meskipun Dalam setiap patroli udara sudah ada giliran bagi tiap Negara untuk mengerahkan pesawatnya, tetapi dalam pesawat tersebut tidak hanya diisi oleh personel militer dari Negara asal pesawat itu melainkan dikolaborasikan dengan personel militer dari 2 Negara lainnya.

Tabel 2. Jenis dan jumlah Pesawat dalam Trilateral Air Patrol

Negara	Pesawat
Indonesia	NC-212
	CN-235
Malaysia	C-130H
	BC-220
Filipina	TC-90

Sumber: Defense News, 2017.

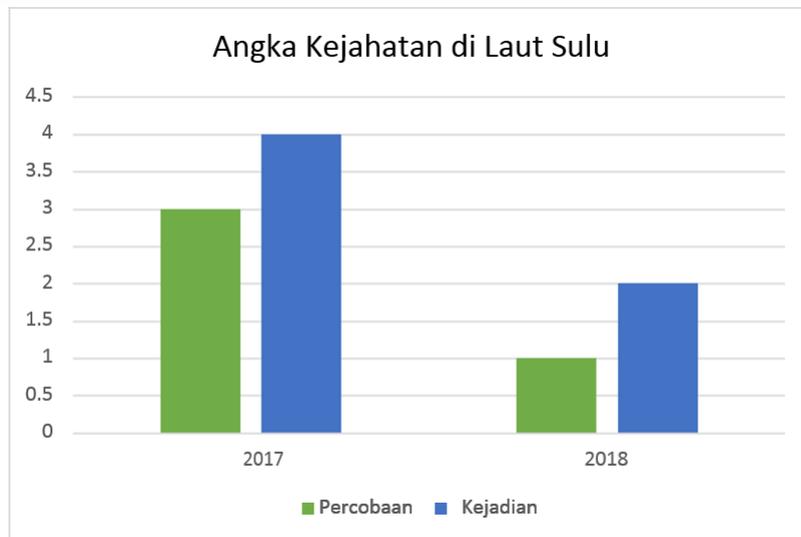
Selain MCC, TMP, dan TAP juga terdapat *Port Visit* yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibangun dengan tujuan meningkatkan *Confidence Building Measure* (CBM) antar Negara yang terlibat. Hingga saat ini sudah dilakukan sebanyak 5 kali *Port Visit* dimana kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada 13 sampai 15 November 2017 di Filipina, *Port Visit* kedua diadakan pada 4-6 April 2018 di Tarakan, *Port Visit* ketiga diadakan pada 4 sampai 6 September 2018 di Sandakan, *Port Visit* keempat diadakan pada 28-30 November 2018 di Zamboanga, dan *Port Visit* kelima diadakan pada 25-27 Februari 2019 di Tarakan (Komando Armada II, 2019). Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan jadwal yang sudah disepakati bersama pada kegiatan ini. Pada *Port Visit* ini dilakukan beberapa agenda seperti latihan gabungan, *Bonding* antar personil, dan juga *Join Working Group* yang berfokus membahas masalah di Laut Sulu.

Terbentuknya INDOMALPHI merupakan bentuk upaya dari ketiga Negara dalam menghadapi ancaman yang muncul di Laut Sulu. INDOMALPHI merupakan kerja sama subregional dengan dasar kepentingan yang sama. Dalam kerja sama ini mencerminkan teori yang dijelaskan oleh Barry Buzan (1983) tentang *Regional Security Complex* yang menjelaskan bagaimana sekelompok Negara yang memiliki masalah keamanan yang saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan (Buzan, 1983). Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi kejahatan di laut oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah yang berada di antara ketiga Negara tersebut memiliki masalah keamanan yang berkaitan dimana Laut Sulu menjadi *Locus Delictie* dari rangkaian tindak kejahatan Abu Sayyaf selama 2014-2016 dan ketiga Negara tersebut merupakan *Litoral State* yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu. Pada teori ini juga dijelaskan tentang kedekatan wilayah geografis menghasilkan ketergantungan antar satu sama lain, dan hal ini yang terjadi juga pada INDOMALPHI dimana ketiga Negara tersebut saling membutuhkan dalam upayanya mengamankan Laut Sulu.

Dalam teori ini terdapat 2 pola penting yaitu pola persahabatan (*Amity*) dan permusuhan (*Enmity*), Pola *Enmity* yang meningkat dalam bentuk negatif (*Security Complex*) akan menghasilkan *Conflict Formation*, sedangkan jika pola *Amity* yang meningkat kearah positif di antara Negara-negara maka yang akan terbentuk adalah *Security Community* (Yani dan Montratama, 2017: 79). Pada pola ini, INDOMALPHI dapat digolongkan sebagai *Amity* yang berlanjut menjadi *Security Community* dimana ketiga Negara ini dulunya sempat melakukan kerja sama bersifat temporer pada tahun 2006 untuk menghadapi ancaman dari kelompok Abu Sayyaf, Moro International Liberation Front (*MILF*), dan Jemaah Islamiyah (JI) namun saat itu masih terkendala ketidakstabilan situasi politik masing-masing Negara dan minim kapabilitas (Solari, 2008: 31). Hubungan kerja sama singkat tersebut yang menjadi pola kekerabatan yang ada di antara ketiga Negara dan pada saat ini menjadi lebih kuat karena adanya ancaman yang intensif dari Abu Sayyaf dan menjadikan ketiga Negara ini membentuk *Security Community* yaitu INDOMALPHI.

INDOMALPHI sebagai bentuk kerja sama antar 3 Negara seperti yang sudah disebutkan berfokus pada keamanan Laut Sulu, sesuai dengan konsep *Maritime Security* yang didefinisikan oleh Natalie Klein (2011) sebagai perlindungan terhadap wilayah maritim suatu Negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan, maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi di laut (Klein, 2011: 11). Konsep ini dalam penerapannya diasumsikan sebagai tindakan preventif ataupun responsif untuk melindungi wilayah maritim sebuah Negara dari gangguan keamanan ataupun tindakan yang melanggar hukum (Yani dan Montratama, 2017). INDOMALPHI jika dikaitkan dengan konsep tersebut sangat identik dimana pada implementasinya, INDOMALPHI melakukan tindakan responsif terhadap meningkatnya angka kejahatan di Laut Sulu dan sekaligus melakukan aksi pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya aksi serupa. Perompakan dan penculikan yang dihadapi oleh INDOMALPHI juga sesuai dengan apa yang disebutkan pada konsep tersebut merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan.

INDOMALPHI yang merupakan kerja sama Trilateral atau 3 Negara merupakan kerja sama ideal yang dibutuhkan dalam menjaga keamanan Laut Sulu, hal ini didasari pada pernyataan Grace Guiang (2017) bahwa kerja sama bilateral dalam pengamanan sudah tidak lagi cukup dengan 2 faktor utama yaitu Negara-negara dibatasi batas-batas dan tata kelola yang sulit dan mencakup tentang kapabilitas dari angkatan laut regional dan penjaga pesisir tentang kapabilitas dan sumber dayanya yang belum cukup dalam menangani ancaman (Guiang, 2017). Dan hal ini dapat tercermin secara langsung pada 1 tahun setelah INDOMALPHI berjalan, dimana dalam waktu singkat hasil positif sudah dapat terlihat.



Grafik 1. Angka Penyusutan Kejahatan di Laut Sulu
Sumber: ReCAAP Annual Report 2018.

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pasca berjalannya patroli terkoordinasi INDOMALPHI tingkat kejahatan di Laut Sulu mengalami penyusutan yang signifikan. Pada tahun dimana INDOMALPHI mulai diluncurkan terdapat 7 kejadian dengan 3 berbentuk percobaan dan 4 berupa aksi langsung, dan pada tahun 2018 dimana INDOMALPHI sudah berjalan memasuki 1 tahun operasinya hanya terdapat 3 kejadian dengan 1 percobaan dan 2 aksi langsung.

Keberhasilan dalam waktu singkat pasca berjalannya INDOMALPHI tidak dapat terlepas dari hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang dianggap tantangan adalah program *Hot Pursuit*. Program ini merupakan salah satu program yang menjadi kunci dalam visi dan misi kerja sama ini namun hingga saat ini belum dapat dilaksanakan karena terkendala belum sepakatnya ketiga Negara. Program ini masih sulit dijalankan hingga sekarang karena terkendala oleh batas Negara dan SoP, menurut Kasubdit Multilateral Kementerian Pertahanan *Hot Pursuit* merupakan hal yang rumit dalam pembahasannya karena menyangkut wilayah yurisdiksi yang jika salah dalam penerapan akan berakibat salah satu Negara dianggap melanggar batas wilayah Negeranya, meskipun mereka terikat dalam satu kerja sama (Ramsi, Wawancara, 10 Mei 2019). Kesulitan dalam kesepakatan *Hot Pursuit* juga terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menyangkut ketiga Negara Hal ini dianggap merupakan hal yang rumit dalam penyusunan SoP maupun mengatur tentang hukum yang berlaku. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan bapak Hassan Wirajuda yang menyatakan bahwa agenda ini tidak perlu dipersulit karena dengan menyepakati kerja sama menyangkut pengamanan suatu wilayah

yang berbatasan dengan *Litoral State* dan Negara-negara tersebut yang ikut serta, aturan *border* dapat menjadi fleksibel dalam situasi yang sudah disepakati (Wirajuda, Wawancara, 21 Maret 2019).

Dari penjelasan dan analisis di atas dapat dilihat bahwa pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu "Bagaimana Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu" dapat terjawab dengan berbagai bentuk kerja sama yang ada seperti TMP, TAP, MCC, dan *Port Visit*. Dalam implementasi kerja sama yang belum genap 2 tahun ini juga dapat dilihat bahwa selama lebih dari setahun berjalan, kerja sama ini telah menunjukkan hasil sementara yang positif dengan menyusutnya angka kejahatan di Laut Sulu sejak patroli terkoordinasi di laut dan udara serta beberapa kerja sama lain diterapkan. Disamping hasil sementara yang ditunjukkan, kerja sama ini juga terus dikembangkan melalui proyeksi kedepannya seperti mematangkan kerja sama seperti *Hot Pursuit* yang dianggap tantangan dalam mengembangkan kerja sama ini untuk kedepannya.

Kerja sama INDOMALPHI dalam periode penerapannya belum menunjukkan apakah kerja sama ini akan terus berjalan dalam artian permanen ataukah hanya bersifat temporer atau kondisional bergantung pada seberapa besar dampaknya pada ancaman yang menjadi landasan terbangunnya kerja sama ini. INDOMALPHI yang pada 2 tahun sejak berjalan menunjukkan angka penyusutan kejahatan di Laut Sulu dengan angka 3 kejadian berupa 1 kali percobaan dan 2 aksi yang terjadi.³ Data ini memberi tanda bahwa dalam waktu singkat kerja sama ini sudah dapat memberi hasil positif walaupun tidak drastis nilainya. Terkait hal ini, dapat diasumsikan bahwa dalam waktu singkat kerja sama ini memang memberi hasil positif namun tidak signifikan namun meski begitu hasil ini dapat membuka singkat. Meskipun tidak ada kepastian apakah akan bersifat permanen tetapi jika dilihat berdasarkan hasil sementara ini, dalam beberapa waktu kedepan kerja sama ini akan terus berjalan karena seefisien apapun suatu kerja sama dalam menangani permasalahan keamanan tidak dapat serta merta menghilangkan tindak kejahatan sepenuhnya namun dapat mengurangi angka dan intensitasnya.

Kesimpulan

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Laut Sulu merupakan perairan yang penting di kawasan Asia Tenggara disamping Selat Malaka sebagai wilayah yang dilewati kapal-kapal baik sebagai rute perdagangan maupun sebagai rute transportasi. Namun letak yang strategis dan dimanfaatkan sebagai rute transportasi maupun perdagangan dimanfaatkan oleh kelompok Abu Sayyaf sebagai ladang dalam melakukan aksi perompakan dan penculikan yang disertai tebusan. Situasi ini terus berkembang angka kejadiannya sejak 2014-2016, aksi yang dilakukan ini penulis lihat sebagai bentuk kegagalan otoritas laut Filipina dalam melihat situasi Laut Sulu yang lalu lintasnya termasuk padat namun dapat dengan mudahnya kelompok Abu Sayyaf melakukan aksinya.

Dalam mengatasi kejahatan tersebut khususnya dalam membebaskan kapal dan sandera penculikan dari kelompok Abu Sayyaf, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah beberapa kali bekerja sama dalam melakukan operasi pembebasan baik yang bersifat militer maupun yang bersifat negosiasi. Kerja sama ini penulis lihat sebagai pintu dalam pengembangan kerja sama yang lebih dalam lagi dan bersifat *sustainable*. Kerja sama berbentuk Trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI) merupakan sebuah bentuk kerja sama komperhensif yang sangat menjanjikan dalam upaya penanganan kejahatan di Laut Sulu. Hal tersebut dapat dikatakan setelah berjalannya kerja sama ini pada tahun 2017 meskipun pada awalnya dalam proses mencapai kesepakatan

antara ketiga Negara penulis lihat hanya akan berujung pada penundaan yang berkepanjangan. Hal ini bukanlah hal yang baru karena pada prosesnya, kerja sama antara 2 Negara (Bilateral) pun terkadang mengalami kendala yang berujung pada penangguhan dalam prosesnya dan pada kasus ini yang terlibat 3 Negara (Trilateral). Hal ini dapat penulis lihat sebagai keseriusan dan komitmen ketiga Negara dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Laut Sulu dalam kurun waktu 2014-2016 dimana proses pertemuan dan perundingan hanya berlangsung selama 1 tahun dari 2016-2017.

Dalam Implementasinya, kerja sama berbentuk patroli terkoordinasi di laut maupun udara dari INDOMALPHI memberi hasil positif dengan berbagai armada kapal dan pesawat yang digunakan. Disamping armada kapal dan pesawat yang digunakan juga dapat dilihat efektivitas muncul dari MCC yang menjadi pusat informasi dalam berjalannya patroli terkoordinasi dari INDOMALPHI. Kerja sama ini juga didukung dengan kegiatan *Port Visit* yang didalamnya berisi agenda seperti latihan gabungan dan juga forum diskusi untuk berbagi data dan informasi seputar kerja sama ini. Penulis melihat ini selain sebagai upaya memperkuat kerja sama, latihan gabungan, dan juga forum dalam bertukar informasi namun ada hal lain yang ditujukan melalui *Port Visit*. Kegiatan *Port Visit* penulis lihat sebagai salah satu strategi *Deterrence* yang diberikan INDOMALPHI kepada kelompok Abu Sayyaf bahwa kerja sama ini *solid* dan rutin melakukan konsolidasi sehingga akan sulit untuk mencari celah dan hal ini terbukti dalam menyusutnya angka kejahatan di Laut Sulu sejak 2017 sampai 2018.

Dibalik kesuksesan awal dari INDOMALPHI, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi optimalisasi kerja sama ini salah satunya adalah wacana *Hot Pursuit* yang telah direncanakan sejak awal digagasnya kerja sama ini. Wacana ini dalam penerapannya disebutkan terkendala oleh SoP dan prinsip dari masing-masing Negara yang enggan wilayah yurisdiksinya dilewati Negara lain meskipun tergabung dalam kerja sama ini karena dalam sistem *Hot Pursuit* ini Negara yang dalam keadaan bertugas dan melihat ada tindak kejahatan akan refleksi mengejar kapal kelompok yang beraksi dan tentunya berpotensi melewati batas Negara lain. Namun berdasarkan pernyataan dari Bapak Hassan Wirajuda yang menyatakan dalam menerapkan bagian kerja sama ini tidak perlu dipersulit karena selama kerja sama ini berjalan seharusnya dapat dibuat sebuah perjanjian sementara. Penulis melihat bahwa masih terdapat rasa kurang percaya yang ada di antara ketiga Negara sehingga hal yang sifatnya dapat diselesaikan menjadi bersifat baku karena dalam skenario ini jika dalam suatu pengejaran kapal yang melakukan aksi kejahatan sudah masuk ke wilayah Negara salah satu anggota dan berhasil ditangkap aparat Negara tersebut, diasumsikan Negara tersebut yang dianggap berhasil karena aparat dari Negeranya telah bersiaga terlebih dahulu dan petugas yang mengejar tersebut tidak mendapat pengakuan apapun.

Hal tersebutlah yang masih perlu diselesaikan oleh ketiga Negara ini jika ingin kerja sama ini terus berjalan dalam jangka waktu panjang dan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar seperti *Malacca Strait Patrol* (MSP). Selain itu jika hal ini berhasil tidak menutup kemungkinan kerja sama ini akan menjadi model kerja sama dalam kasus lain yang serupa seperti MSP menjadi model kerja sama yang banyak diambil modelnya oleh INDOMALPHI.

Referensi

- Abuza, Zachary. (2016). *Trilateral Maritime Patrols in the Sulu Sea: Asymmetry in Need, Capability, and Political Will*, Zurich: Eidgenössische Technische Hochschule. <http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/> diakses 25 Mei 2019.
- Anggi, Setio Rachmanto. (2009). "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. V (II)

- Arifin, Saleh. et. al. (2018). "Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim Oleh Kelompok Abu Sayyaf Di Laut Sulawesi – Sulu Dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda Tb Brahma 12 – Kapal Tongkang Bg Anand 12)." *Jurnal Keamanan Maritim* 4 (2)
- Benarnews. (2017, 19 Juni). "Indonesia, malaysia, Filipina Luncurkan Patroli Bersama." <http://benarnews.org/indonesia/berita/joint-patrols-trilateral-06192017201032.html> diakses 23 Maret 2019.
- Buzan, Barry. (1983). *People, State, and Fear*. Sussex: Wheatsheaf Book Ltd.
- Buzan, Barry & Ole Weaver. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University.
- Defense News. (2017, 13 Oktober), "Malaysia, Indonesia dan Filipina Menargetkan ISIS dalam Patroli Udara Trilateral." diakses dari <https://www.defensenews.com/naval/2017/10/13/malaysia-indonesia-and-philippinestarget-isis-intrilateral-air-patrols/> diakses 24 Maret 2019.
- Dursin, Kanis. (2016). "Ancaman Abu Sayyaf: Mengapa Laut Sulu Penting untuk Indonesia?" <https://www.rappler.com/indonesia/131543-mengapa-laut-sulu-pentinguntuk-indonesia> diakses 9 Mei 2019.
- Guiang, Grace. (2017). "In the Face of ASEAN Inaction, Minilaterals Respond to Growing Threats to Regional Security." diakses dari <http://appfi.ph/resources/commentaries/1548-in-the-face-of-asean-inaction-minilaterals-respond-to-growing-threats-to-regionalsecurity>.
- Ho, Joshua. (2006). "The Security of Sea Lanes in Southeast Asia." *Asia Policy* 4 (46)
- International Maritime Organization. (2009). *Piracy and Armed Robbery Againsts Ship: Guidance to ship owners and ship operators, shipmasters, and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ship*. <http://imo.org/en/ourwork/security/piracyarmedrobbery/guidance/documents/MSC.1-Circ.1334.pdf> diakses 1 April 2019.
- Kementerian Pertahanan RI. (2017, 19 Juni). "Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi Dimulai." <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphiresmi-dimulai.html> diakses 25 Maret 2019.
- Kementerian Pertahanan RI. (2017, 12 Oktober), "Launching Trilateral Air Patrol IndonesiaMalaysia-Filipina" <https://www.kemhan.go.id/2017/10/12/launching-trilateral-air-patrolindonesia-malaysia-filipina.html> diakses 25 Maret 2019.
- Klein, Natalie. (2011). *Maritime Security and The Law of The Sea*. New York: Oxford University Press.
- Komando Armada II. (2019, 28 Februari 2019). "DANLANTAMAL XIII Tarakan Membuka Latihan Gabungan Trilateral Maritime Patrol INDOMALPHI 2019." <http://koarmada2.tnial.mil.id/2019/02/25/danlantamal/xiii/tarakan/membuka/latihan/gabungan/trilateral/maritime/patrol/indomalphi/2019> diakses 12 Mei 2019
- Liss, Carolin. (2014). "Assessing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: Trends, Hotspots, and Responses." PRIF Report No. (125)
- Marineregions.org. "Maritime Boundaries." <http://marineregions.org/eezmapper.php> diakses 24 Mei 2019.
- Nations Online. "Map of Southeast Asia Region." http://nationsonline.org/oneworld/map_of_southeast_asia.htm diakses 30 Maret 2019.
- Oceans Beyond Piracy. (2018). "Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia 2017." diakses dari <http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/se-asia> pada 20 Mei 2019.
- Othman, Zarina. (2013). "Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia." *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 4 No. 2
- Parameswaran, Prashanth. (2018). "What's Next for the New ASEAN 'Our Eyes' Intelligence Initiative?" diakses dari <https://thediplomat.com/2018/01/asean-launches-new-our-eyesintelligence-initiative/> pada 20 Mei 2019.

- Press Reader. (2018, 5 September). "Sandakan Navy Port first in Country to host third Trilateral Maritime Patrol Port Visit." <http://pressreader.com/malaysia/the-borneo-postsabah/20180905/281552291739316> diakses 12 Mei 2019.
- Philippine Army. (2017, 14 November). "Philippine Troops Welcome Indonesian-Malaysian Navy delegates in Tawi-Tawi." <http://army.mil.ph/home/index.php/press-releases-2/149-philippine-troops-welcome-indonesian-malaysian-navy-delegates-in-tawi-tawi> diakses 12 Mei 2019.
- Pujayanti, Adirini. 2016. Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas+tim/buku-lintas-tim-3.pdf diakses 23 Maret 2019.
- Rahman, Chris. (2019). Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, With Policy Implications for New Zealand. New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Ramsi, Oktaheroe. 2019. Kasubdit Multilateral Direktorat Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan. Jakarta: Kementerian Pertahanan. Wawancara, 10 Mei 2019 Pukul 13.45 WIB.
- ReCAAP. (2016). Annual Report 2016. <http://recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/annualreport2016.pdf>. diakses 15 Mei 2019
- ReCAAP. (2017). Annual Report 2017. <http://recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/annualreport2017.pdf>. diakses 15 Mei 2019.
- ReCAAP. (2018). Annual Report 2018. <http://recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/annualreport2018.pdf>. diakses 19 Mei 2019.
- Roza, Rizki. (2018). "Keamanan Laut Sulu-Sulawesi: Kaji Ulang Kerja Sama Trilateral?" Info Singkat X (20)
- Solari, Andrés H. Cáceres. (2008). Indonesia, Malaysia and The Philippines Security Cooperation In The Celebes Sea. California: Naval Postgraduate School.
- Storey, Ian. (2018). "Trilateral Security Cooperation in the South-Celebes Seas: A Work in Progress". ISEAS (48)
- Stratfor. "Policing Southeast Asia Tri Border Area." <http://stratfor.com/image/policingsoutheast-asias-tri-border-area> diakses 30 Maret 2019
- Tempo. (2016, 22 Juni). "Indonesia, Filipina, dan Malaysia Sepakati Patroli Laut." <https://nasional.tempo.co/read/782085/indonesia-filipina-dan-malaysia-sepakati-patroliLaut/full&view=ok> diakses 24 Maret 2019
- TNI AD. "Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina", <http://tنيad.mil.id/2016/05/pertemuan-trilateral-antara-indonesia-malaysia-dan-filipina/> diakses 24 Maret 2019.
- UN. (a). Right of Access of Land-Locked States to and From the Sea and Freedom of Transit. http://un.org/depts./los/convention_agreements/texts/unclos/part10.htm diakses 23 Maret 2019.
- UN. (b). Legal Framework for the Repression of Piracy Under UNCLOS. http://un.org/depts./los/piracy/piracy_legal_framework_.htm diakses 23 Maret 2019.
- UN. United Nations Convention on the Law of the Sea. http://un.org/depts./los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf diakses 23 Maret 2019.
- Underwater Asia. "Sulu Sea" <http://underwaterasia.info/dive-guide-philippines/sulusea.php> diakses 30 Maret 2019.
- Waltz, Kenneth N. (1979). Theory of International Politics. California: Mass: AddisonWesley Pub. Co.

*Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina (INDOMALPHI)
dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu Pada Periode 2016-2019*

- Wirajuda, Hassan. 2019. Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001-2009. Jakarta. Museum Nasional. Wawancara, 21 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.
- Yani, Y. Mohammad & Ian Montratama. (2017). Pengantar Studi Keamanan. Yogyakarta: Intrans Publishing.